



Tugiyanto Diancam Pelanggaran Disiplin

PONTIANAK, TRIBUN - *Whistle blower* dugaan tindakan korupsi di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi, Tugiyanto, ternyata telah diperiksa Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin PNS Sekretariat DPRD Kalbar. Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin diketuai M Yusuf SH MH, dengan sekretaris H Firdaus SH.

"Saya sudah diperiksa tim pemeriksa pelanggaran disiplin PNS yang diketuai Pak M Yusuf pada Jumat yang lalu, tanggal 14 Juni. Banyak pertanyaan yang ditujukan ke saya, namun pada intinya mereka mengarahkan kepada pelanggaran disiplin sebagai mana PP nomor 53 tahun 2010," kata Tugiyanto kepada *Tribun*, Sabtu (22/6).

Semua tim menyatakan dukungan atas upaya membongkar kasus korupsi. Utamanya dari anggota tim, Beny Alfred, selaku Kabag Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kalbar, yang dengan tegas mendukung dirinya.

➤ Banyak pertanyaan yang ditujukan ke saya, namun pada intinya mereka mengarahkan kepada pelanggaran disiplin. ➤

TUGIYANTO

PNS Sekretariat DPRD

"Saya ucapkan terimakasih atas pemeriksaan yang dilakukan kepada saya. Khusus ke pada Bapak Beny Alfred, yang dengan nada cukup tinggi dan bersemangat mendukung saya dalam pemberantasan korupsi. Pernyataan beliau sangat berharga memberikan dukungan moral dalam upaya melawan koruptor," jelasnya.

Tugiyanto menegaskan bahwa dirinya akan terus berjuang menegakkan kebenaran. Karena itu merupakan tanggungjawab dan kewajiban sebagai PNS yang adalah abdi negara dan masyarakat.

"Perbuatan yang dilakukan oleh oknum di sekretariat DPRD bersama sindikatnya diketahui oleh Bapak Bambang

sar Rp 500 ribu. Kedua, uang negara pada tahun 2012 yang tadinya berada di kantong atau tabungannya bahkan yang diinvestasikan oknum PNS senang atau tidak senang telah dikembalikan, ini yang mengetahui BPK RI perwakilan Kalbar," ungkapnya.

Terakhir, terhadap perbuatan yang diduga melanggar hukum karena memotong dan pembuatan dokumen penerbitan palsu sebagai bahan laporan keuangan serta pemalsuan tanda tangan masih dalam proses hukum oleh penegak hukum. Apapun yang telah dan sedang akan diputuskan oleh tim pemeriksa disiplin hendaknya diputuskan dengan benar.

"Saya harapkan tim pemeriksa pelanggaran disiplin PNS hendaknya membuat keputusan sesuai harapan dan kenyataan. Serta utamakan keikhlasan dan kejujuran kepada masyarakat. Karena ini telah diketahui masyarakat sebagai penilai," pungkasnya. (rhd)